BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan imigran telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Amerika Serikat (AS). Hal ini memunculkan gagasan tentang identitas AS sebagai bangsa imigran.[1] Gagasan ini antara lain tertuang dalam buku tulisan Presiden ke-35 AS John F. Kennedy dengan judul *A Nation of Immigrants*.[2] Hal ini juga diperkuat buku terbitan Badan Penerangan AS yang mengatakan bahwa AS merupakan negeri kaum imigran.[3] Kebanyakan imigran yang masuk ke AS bertujuan untuk mencari kesempatan dan kebebasan.[4] Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada tahun 2017 AS merupakan negara dengan jumlah imigran terbanyak di dunia.[5] Pada saat itu, jumlah imigran mencapai angka 49,8 juta jiwa, angka ini merupakan 15,1% dari total penduduk AS.[6] Dari seluruh imigran tersebut, sebanyak 77% imigran masuk secara legal dan sah menurut hukum, sedangkan 23% lainnya masuk secara ilegal dan tidak sah menurut hukum.[7]

Isu imigran menjadi hal yang penting di AS pasca dikeluarkannya kebijakan *War on Terror* sebagai respon tragedi penyerangan 9/11 pada masa Presiden Bush.

---

[1] Yohanes William Santoso, "Kecenderungan Kebijakan Imigrasi Amerika Serikat di Era Pemerintahan Donald Trump," *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Airlangga*, Vol. 1, No. 2, 2018: 3

[2] Leti Volpp, "The Indigenous As Alien," *UC. Irvine Law Review*, Vol. 5, Issue 2, (2015): 290

[3] Howard Cincotta, ed, *Garis Besar Sejarah Amerika* (United States Information Agency, 1 Januari, 1994), 436-437

[4] Howard Cincotta, ed, 436-437

[5] United Nation Population Division, "International Migrants Stocks: 2017", https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2017/estimatesgraphs.asp?0g0 (Diakses 20 Maret 2021)

[6] United Nation Population Division, "International Migrants Stocks: 2017"

[7] Abby Budiman, "Key Finding about US Immigrants," Factank: News in the Numbers, Pew Research Center, 2019 https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/08/20/key-findings-about-u-s-immigrants/ (Diakses 20 Maret 2021)

Kebijakan ini tidak hanya berdampak buruk bagi imigran Muslim yang diduga melakukan serangan, tetapi juga memberikan dampak serta pandangan negatif kepada seluruh imigran tanpa memandang etnis atau status.[8] Pada masa pemerintahan Obama isu imigran kembali mereda, Obama lebih terbuka dan ramah pada imigran. Ia menganggap imigran memberikan kontribusi di berbagai sektor di AS.[9]

Pada masa kampanye Pemilihan Calon Presiden AS tahun 2016, isu imigran kembali diangkat oleh calon Presiden Donald Trump melalui pernyataannya yang ditujukan kepada imigran dari Meksiko.[10] Isi pernyataannya antara lain:

> *And now they are beating us economically. They are not our friend, believe me. But they're killing us economically. The U.S. has become a dumping ground for everybody else's problems* [...] *When Mexico sends its people, they're not sending their best, They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. And some, I assume, are good people.*[11]

Dari pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa Trump menganggap para imigran merusak perekonomian, dan menyatakan bahwa AS telah menjadi tempat pelarian semua orang. Kemudian ia juga mengatakan bahwa orang-orang Meksiko membawa berbagai tindak kejahatan ke AS.

Namun pada kenyatannya, dari tahun 2012-2018 tingkat kriminalitas imigran yang masuk ke AS lebih rendah daripada yang dilakukan oleh masyarakat kelahiran AS. Secara umum, tingkat kejahatan masyarakat kelahiran AS adalah

---

[8] Walter A. Ewing, Daniel E. Martinez, and Ruben G. Rumbaut, "The Criminalization of Immigration in the United States", *Special Report of American Immigrations Council* (2015): 15

[9] Ayman Al Sharafat, "Attitudes of the United States' Presidents Towards Immigration: George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump", *RSA Journal*, Issue 30 (2019), 61

[10] Elizabeth Chacko, *"Immigration and Populist Policies in The United States of America,"* Victoria University of Wellington, 3

[11] Katie Reilly, "*Here Are All the Times Donald Trump Insulted Mexico"*, Times, 2016 https://time.com/4473972/donald-trump-mexico-meeting-insult/ (Diakses 20 Maret 2021)

±1.000 penangkapan per 100.000 orang, sedangkan untuk imigran, tingkat penangkapannya yaitu ±600 penangkapan per 100.000 orang.[12] Data ini menggambarkan bahwa tingkat kriminalitas yang dilakukan warga kelahiran AS lebih tinggi ketimbang tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh imigran, baik imigran yang masuk secara resmi, maupun yang tidak resmi atau ilegal.

Kemudian, terkait pandangannya terhadap imigran, Donald Trump merupakan presiden satu-satunya dalam sejarah AS yang mengambil sikap keras terhadap imigrasi.[13] Hal ini tergambarkan dalam pidato pengukuhan Donald Trump pada tanggal 20 Januari 2017:[14]

> *Every decision on trade, on taxes, on immigration, on foreign affairs will be made to benefit American workers and American families. We must protect our borders from the ravages of other countries making our products, stealing our companies and destroying our jobs. Protection will lead to great prosperity and strength. I will fight for you with every breath in my body, and I will never, ever let you down.*

Dari kutipan pidato diatas, dapat kita lihat bahwa Trump ingin setiap keputusan memberikan keuntungan bagi para pekerja dan keluarga AS. Ia ingin melindungi perbatasan dari kerusakan negara lain, yang dianggapnya telah mencuri dan menghancurkan pekerjaan warga AS. Trump juga mengatakan bahwa Ia akan berjuang untuk warga AS. Sikap keras Trump terhadap imigran juga dapat dilihat bahwa Trump telah menandatangani lebih dari sembilan perintah eksekutif atau *executive order* tentang imigrasi.[15]

---

[12] Light, Michael T., Jingying He, dan Jason P. Robey. "Comparing Crime Rates between Undocumented Immigrants, Legal Immigrants, and Native-Born US Citizens in Texas." Proceedings of the National Academy of Sciences 117, no. 51 (Desember 7, 2020): 32340–32347.
[13] Ayman Al Sharafat, "Attitudes of the United States' Presidents Towards Immigration: George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump", *RSA Journal*, Issue 30 (2019): 55
[14] The Politico, "Full text: 2017 Donald Trump inauguration speech transcript", 2017, https://www.politico.com/story/2017/01/full-text-donald-trump-inauguration-speech-transcript-233907 (Diakses 20 April 2021)
[15] Ayman Al Sharafat, 55

Kemudian, Donald Trump sebagai presiden mengeluarkan Perintah Eksekutif pertamanya yaitu *Executive Order* No. 13769 dengan judul "*Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States*" pada tanggal 27 Januari 2017.[16] Perintah Eksekutif ini merupakan bentuk penepatan janji kampanyenya untuk menangguhkan imigrasi dari negara-negara yang rawan dengan terorisme.[17] Donald Trump juga mengkhawatirkan keterkaitan pengungsi Suriah dengan ekstrimis seperti ISIS.[18] Salah satu isi Perintah Eksekutif ini yaitu larangan dan penangguhan terhadap imigran yang berasal dari tujuh negara yaitu Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman untuk masuk ke AS selama 90 hari sejak ditandatanganinya perintah tersebut.[19] Namun di sisi lain, data di lapangan menunjukkan kemungkinan terbunuh oleh aksi teror dari imigran hanya 1 banding 3,6 juta, dan termasuk di dalam total kematian akibat peristiwa 9/11.[20] Hal ini menunjukkan bahwa kekhawatiran Trump terhadap aksi teror yang dilakukan oleh imigran bertolak belakang dengan apa yang terjadi di lapangan.

Selanjutnya, sebagai Presiden AS, Donald Trump menetapkan kebijakan *Zero Tolerance* di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri atau *Departmen of Homeland Security* (DHS) secara tidak resmi pada 2017.[21] Dari bulan Juli hingga Oktober 2017, kebijakan ini dijalankan sebagai *pilot program* atau program

---

[16] Federal Register, "*Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States*", 2017 https://www.federalregister.gov/executive-order/13780 (Diakses 23 Maret 2021)
[17] Muhammad Arraf Rezkia Rachman, "Analisis Kebijakan Travel Ban oleh Donald Trump," *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 04, No. 02, (2018): 229
[18] Muhammad Arraf Rezkia Rachman: 230
[19] Federal Register, "*Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States*", 2017
[20] Alex Nowrasteh: "Terrorism and Immigration: A Risk Analysis," Cato Institute Policy Analysis No. 798 (2016): 1
[21] Karina Utami Dewi & Desti Putri Cahyani, "Kebijakan Imigrasi Zero Tolerance Amerika Serikat: Analisis Kekerasan Struktural," *Jurnal Global Strategis*, Th. 14, No. 1 (2020): 32

percontohan oleh DHS dengan melakukan pemisahan terhadap keluarga imigran.[22] Kemudian, melihat meningkatnya jumlah imigran ilegal yang masuk ke AS, yaitu 203% dari bulan Maret 2017 sampai Maret 2018, Departemen Kehakiman atau *Department of Justice* menerapkan kebijakan *Zero Tolerance* secara resmi.[23] Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah imigran ilegal masuk ke AS dan untuk memeriksa para imigran dan pencari suaka yang berniat tinggal di AS dengan cara yang curang atau ilegal.[24] Penerapannya dilakukan dengan menahan imigran di tahanan federal AS dan memisahkan anak-anak yang orang tuanya ditahan untuk ditempatkan di bawah pengawasan Department of Health and Human Services.[25]

Kebijakan *Zero Tolerance* ini menuai banyak kontroversi dari dunia internasional karena dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), apalagi AS merupakan negara yang mengakui *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR).[26] Kebijakan ini juga ditentang oleh negara-negara seperti Brasil, Venezuela, El Savador, Guatemala, Honduras, serta Meksiko yang berbatasan langsung dengan AS.[27] Bahkan di dalam negeri pun terjadi aksi protes yang dihadiri puluhan ribu peserta di Ibu Kota Washington DC. Kebijakan juga ini

---

[22] Lisa Rodan & Hannah Rappleye, "Trump admin ran 'pilot program' for separating migrant families in 2017", NBC News, 2018 https://www.nbcnews.com/storyline/immigration-border-crisis/trump-admin-ran-pilot-program-separating-migrant-families-2017-n887616 (Diakses 17 April 2021)

[23] Press Release, Department of Justice, "Attorney General Announces Zero-Tolerance Policy for Criminal Illegal Entry", Journal of Criminal Law & Criminology

[24] U.S. Department of Justice, Office of Public Affairs, "Attorney General Sessions Delivers Remarks Discussing the Immigration Enforcement Actions of the Trump Administration,"

[25] Nicole Narea, "The Trump administration just admitted that it separated an additional 1,500 immigrant families", Vox, 2019 https://www.vox.com/policy-and-politics/2019/10/25/20931992/trump-administration-aclu-lawsuit-separate-families-immigrant-policy-1500 (Diakses 21 Maret 2021)

[26] Jeffrey Davis, "US 'zero-tolerance' immigration policy still violating fundamental human rights laws", Amnesty International, 2018 https://theconversation.com/us-zero-tolerance-immigration-policy-still-violating-fundamental-human-rights-laws-98615 (Diakses 21 Maret 2021)

[27] Will Grant, "Migrant Children: Latin America Unites in Outrage", BBC News, https://www.bbc.com/news/world-latin-america-44574589 (Diakses 21 Maret 2021)

mendapat kecaman dari Kongres Partai Demokrat, musisi, bintang film terkenal, hingga Paus Fransiskus yang menganggap kebijakan ini melanggar ajaran agama Katolik.[28]

Dari penjelasan sebelumnya, dapat dilihat bahwa Donald Trump menganggap imigran sebagai ancaman. Trump juga memiliki peran yang penting dalam penetapan kebijakan *Zero Tolerance*, hal ini terlihat sejak awal masa kampanyenya yang menyinggung tentang imigran dan beberapa Perintah Eksekutif yang dikeluarkannya sebelum kebijakan ini. Pilihan Trump tetap melanjutkan kebijakan tersebut, terlepas dari berbagai respon negatif dunia internasional dan dalam negeri, dapat mengindikasikan bahwa Donald Trump memiliki persepsi ancaman dalam penetapan kebijakan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Isu imigran menjadi isu yang sangat diprioritaskan oleh AS di masa Pemerintahan Donald Trump. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai pernyataan Trump terkait imigran baik pada masa kampanye maupun saat ia mulai menjabat. Terkait masalah ini, Trump kemudian mengeluarkan Perintah Eksekutif No. 13769 pada tahun 2017 yang membatasi jumlah masuk imigran ke AS yang mungkin dapat mengancam keamanan AS seperti terorisme. Namun, pada rentang waktu tahun 2017-2018, terdapat tren meningkatnya jumlah masuk imigran ke AS terkhusus dari perbatasan dengan Meksiko. Dalam penangannya, Pemerintah AS mengeluarkan kebijakan *Zero Tolerance* yang diprakarsai oleh Trump yang kemudian berlaku

[28] Eva Mazrieva, "Ribuan Warga AS Protes Kebijakan Imigrasi Zero Tolerance", Voice of America (VOA) Indonesia, diakses melalui https://www.voaindonesia.com/a/ribuan-warga-as-protes-kebijakan-imigrasi-zero-tolerance-/4461979.html, (Diakses 4 April 2021)

secara resmi pada bulan April 2018. Kebijakan ini dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), apalagi AS merupakan negara yang mengakui *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Penetapan kebijakan ini juga tidak sejalan dengan gagasan bahwa AS merupakan negara imigran. Pilihan Donald Trump untuk tetap melanjutkan kebijakan ini memeperlihatkan indikasi bahwa Trump memiliki persepsi ancaman dalam penerapan kebijakan *Zero Tolerance* terlepas dari respon negatif dunia internasional maupun dalam negeri.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian yang ingin dijawab yaitu bagaimana persepsi ancaman Donald Trump dalam pemberlakuan kebijakan *Zero Tolerance* di AS?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan persepsi ancaman Donald Trump dalam penetapan kebijakan *Zero Tolerance* di AS.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah kepustakaan dalam kajian Hubungan Internasional, khususnya yang berkaitan dengan isu imigran melalui kebijakan *Zero Tolerance* pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump.

2. Sebagai sumber referensi bagi penelitian selanjutnya terkait permasalahan yang sama.

1.6 Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa rujukan/referensi yang dijadikan studi untuk membantu memahami isu lebih dalam. Tulisan pertama yaitu sebuah tulisan dengan judul *United States Immigration Policies in the Trump Era* yang ditulis oleh Amadu Jacky Kaba.[29] Tulisan ini membahas tentang kebijakan imigrasi AS di Era Trump. Di awal dijelaskan bahwa pada 2017 lebih dari 250 juta migran tersebar di seluruh dunia. Akibat dari fenomena migran ini PDB dunia meningkat dari 22,6 triliun dolar pada tahun 1990 menjadi 80,73 triliun dolar pada 2017. Dalam tulisan ini disampaikan bahwa salah satu negara yang berperan penting dalam hal ini adalah AS yang mana merupakan negara dengan jumlah imigran terbanyak di dunia, yaitu hampir mencapai 50 juta jiwa. AS juga dinilai berperan penting dalam mendorong negara-negara maju lainnya untuk menerima lebih banyak imigran. Tulisan ini menyampaikan bahwa Presiden Donald Trump dan pemerintahannya merusak kemajuan ini dengan menerapkan kebijakan imigrasi yang menyebabkan penurunan jumlah imigran yang masuk ke AS serta menyerukan kepada negara-negara eropa untuk mengurangi jumlah imigran. Di sini juga dijelaskan ada perbedaan antara Trump dan Obama, di mana pada pemerintahan Donald Trump secara signifikan membatasi imigran yang masuk ke AS dan membuat orang enggan untuk bermigrasi ke AS dan membuat imigran terampil dan tidak terampil di AS mempertimbangkan untuk meninggalkan AS. Kebijakan imigrasi ini juga menyebabkan banyak kecemasan bagi imigran di AS dan orang-orang di seluruh dunia. Tulisan ini berkontribusi dalam membantu

[29] Amadu Jacky Kaba, "United States Immigrations Policies in the Trump Era," *Sociology Mind*, Vol 9 No. 4 (2019): 316-349

penulis melihat gambaran kebijakan imigrasi di masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Perbedaan dengan penelitan ini dengan penelitian penulis adalah, pada penelitian ini lebih berfokus mengenai dampak dari kebijakan imigrasi Donald Trump.

Kajian pustaka kedua yaitu *Attitudes of the United States' Presidents Towards Immigration: George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump* yang ditulis Ayman Al Sharafat.[30] Penulis mencoba melihat bagaimana perbedaan antara Bush, Obama, dan Trump dalam menanggapi isu imigrasi. Bush memilki perhatian yang cukup besar terhadap masalah imigran, pasca peristiwa 9/11 Bush mengeluarkan serangkaian kebijakan tegas terhadap imigran karena merasa prihatin terhadap keamanan negara. Kedua, Obama lebih terbuka terhadap imigran, ini tak lepas dari kenyataan bahwa Obama berasal dari keturunan imigran, yaitu ayahnya yang berasal dari Kenya. Pada masa pemerintahannya, Obama memberikan kesempatan kepada imigran ilegal yang memenuhi syarat untuk tinggal sementara di AS sampai masa tiga tahun sebelum dideportasi melalui program *Deffered Action for Children Arrivals* (DACA) dan *Deferred Action for Parents of Americans* (DAPA). Terakhir, Trump merupakan satu-satunya Presiden AS yang secara terbuka mengambil sikap garis keras tentang imigrasi. Selain itu, ia juga sering menyampaikan retorika anti-imigrannya untuk menggiring opini publik bahwa imigran merupakan ancaman bagi keamanan nasional AS. Di sini terlihat ada perbedaan yang jauh dengan presiden pendahulunya, ia sangat agresif untuk membentuk kebijakan keras terhadap imigran. Kontribusi penilitan ini adalah

[30] Ayman Al Sharafat, "Attitudes of the United States' Presidents Towards Immigration: George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump," *RSA Journal*, Issue 30 (2019): 53-67

membantu penulis dalam melihat bagaimana perbedaan sikap Donald Trump dengan presiden-presiden sebelumnya dalam menanggapi isu imigran. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih berfokus tentang perbedaan presiden-presiden AS dalam menanggapi isu imigran.

Kajian pustaka yang ketiga yaitu tulisan berjudul *Do Immigrants Threaten US Public Safety* yang ditulis oleh Pia Orrenius dan Madeline Zavodny.[31] Tulisan ini menjelaskan tentang apakah imigran yang masuk ke AS benar-benar mengancam keamanan publik di sana. Disampaikan bahwa seruan Donald Trump untuk membangun tembok perbatasan AS-Meksiko guna membendung arus imigran dari Meksiko. Hal ini dilakukan oleh Trump karena ia menganggap bahwa banyak imigran yang bertanggung jawab atas tindak kriminal yang terjadi di AS. Namun bertentangan dengan klaim Trump, justru tingkat kejahatan atau kriminal oleh imigran masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kriminal warga AS. Kontribusi dari tulisan ini membantu penulis melihat bagaimana gambaran imigran dan tingkat kriminalitasnya di AS serta bagaimana tanggapan AS terhadap imigran. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini lebih berfokus mengenai dampak imigran terhadap keamanan publik serta tingkat kriminalitas di AS.

Studi pustaka keempat yaitu artikel jurnal berjudul *The Appeal of the Primal Leader: Human Evolution and Donald J. Trump* yang ditulis oleh Dan P. McAdams.[32] Tulisan ini menjelaskan bahwa hampir 63 juta warga AS memilih

[31] Pia Orennius & Madeline Zavodny, "Do Immigrants Threaten US Public Safety?," *Journal on Migration and Human Security*, Vol 7 No. 3 (2019): 53-61
[32] Dan P. McAdams, "The Appeal of the Primal Leader: Human Evolution and Donald J. Trump," *Evolutionary Studies in Imiginative Culture*, Vol. 1 No. 2 (Fall 2017): 1-13.

Donald Trump pada pemilihan umum tahun 2016. Dikatakan bahwa kemenangannya membantah pendapat ahli dan telah mengejutkan dunia. McAdams menyebutkan bagaimana mungkin Trump yang merupakan seorang yang narsistik, tidak memiliki pengalaman politik ataupun militer, yang juga sering mengucapkan kebohongan liar serta kata kasar, dan menganggap imigran Meksiko sebagai pemerkosa serta memandang perubahan iklim sebagai tipuan Tiongkok dapat terpilih menjadi Presiden AS. Kontribusi dari penelitian ini membantu peneliti melihat bagaimana proses Trump dapat memikat masyarakat AS dilihat dari perspektif psikologi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus kepada bagaimana proses Trump memikat masyarakat AS hingga bisa menjadi Presiden AS.

Kajian pustaka yang kelima yaitu *Prime Minister Leadership Style in Foreign Deicision Making: A Framework for Research.*[33] Di sini menjelaskan gaya kepemimpinan adalah kebiasaan kerja (*work habits*) para pemimpin, yakni bagaimana mereka berhubungan dengan orang-orang di sekitar mereka, bagaimana mereka menerima informasi, dan bagaimana mereka mengambil keputusan. Kebiasaan kerja ini membentuk pola tertentu yang berbeda antara satu pemimpin dengan pemimpin lainnya. Misalnya, beberapa pemimpin cenderung banyak terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sementara beberapa lainnya lebih menyukai pendelegasian wewenang. Idiosinkratik sebagai faktor faktor yang berkaitan dengan aspek kepribadian (personality) dari seorang pengambil keputusan. Kontribusi tulisan ini adalah membantu penulis melihat bagaimana gaya

[33] Juliet Karboo, "Prime Minister Leadership Style in Foreign Decision Making Aframework for Research," *Political Psychology*, vol 18 no. 3 (1997): 583-581

kepemimpan para pemimpin dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan. Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian ini lebih membahas tentang faktor-faktor yag membentuk karakteristik individu atau pemimpin.

1.7 Kerangka Konseptual

Untuk menjabarkan persepsi ancaman Presiden Donald Trump dalam penetapan kebijakan *Zero Tolerance* terkait isu imigran di AS, peneliti menggunakan konsep persepsi ancaman atau *threat perception*. Konsep ini peneliti gunakan untuk menjelaskan bagaimana persepsi ancaman yang dirasakan oleh Presiden Donald Trump dan beberapa hal yang dapat mempengaruhi persepsi ancaman tersebut dalam penetapan kebijakan *Zero Tolerance*. Rasionalisasi penggunaan konsep *threat perception* adalah karena peneliti ingin melihat pandangan individu, yaitu Presiden Donald Trump, dalam menanggapi isu imigran yang dianggapnya sebagai ancaman terhadap AS.

1.7.1 Persepsi Ancaman / Threat Perception

Persepsi mengandung arti bahwa setiap keputusan yang diambil oleh individu tidak akan pernah dapat dipisahkan dari keyakinan dan kepercayaan individu tersebut dalam melihat dunia sekitarnya dan juga aktor lain yang berhubungan dengannya. John E. Maroz mengartikan persepsi sebagai pemahaman dan kesadaran diri terhadap peristiwa, situasi, atau proses. Pemahaman dan kesadaran diri ini pada dasarnya akan mempengaruhi sikap seseorang terhadap suatu hal.[34] Menurut Daniel S. Papp persepsi adalah suatu cara pandang individu

[34] Asrudin dan Mirza Jaka Suryana, Analisis Konstrutivisme Tentang Persepsi Ancaman, Jurnal Global dan Strategis, Vol 7, No.1, hal. 5

yang pembentukannya dipengaruhi oleh pengalaman pada masa lalu, ekspektasi masa kini, keinginan atau ketakutan yang dipengaruhi pihak lain serta faktor-faktor lainnya.[35] Sedangkan menurut Janies Gross Stein, persepsi adalah proses menangkap secara indrawi, mengenali, serta memproses apa yang ditangkap.[36]

Persepsi individu dipengaruhi keadaan emosional, pengolahan informasi, dan pola inferensi dan atribusi. Pada tingkat kolektif, proses persepsi lebih sulit untuk diidentifikasi. Pemahaman-pemahaman dan emosi saling dibagi dan dikomunikasikan guna menciptakan suasana kebersamaan. Pada tingkat kolektif, ancaman dibangun secara sosial di dalam dan di antara wacana para ahli, aktor politik, dan masyarakat masyarakat secara umum.[37] Ancaman muncul dari persepsi yang melihat bahwa suatu isu adalah ancaman, di sini kita dapat lihat bahwa Donald Trump melihat imigran yang masuk ke AS sebagai ancaman.

Janice Gross Stein dalam tulisannya membahas mengenai penjelasan non psikologis dan psikologis tentang persepsi ancaman. Dalam tulisannya juga dijelaskan bahwa para ahli dalam hubungan internasional telah mengidentifikasi dan kemudian menilai adanya suatu kontribusi psikologi yang membawa teori yang berbeda untuk menganalisis persepsi ancaman.[38]

---

[35] Daniel S Paap, *Contemporary International Relation Framework for Understanding (Second Edition)*, (New York: Macmillan Publishing Company) 1998, hal. 155

[36] Janice Gross Stein, "Threat Perception In International Relations", In *The Oxford Handbook Of Political Psychology*, ed. Leonie Huddy, David O. Sears, And Jack S. Levy, Oxford University Press 2013, hal. 1

[37] C.O. Meyer, International Terrorism As A Force Of Homogenization? A Constructivist Approach To Understanding Cross-National Threat Perceptions And Responses, *Cambridge Review Of International Affairs*, (2009), Hal. 648

[38] Janice Gross Stein, "Threat Perception In International Relations", dalam *The Oxford Handbook Of Political Psychology*, ed. Leonie Huddy, David O. Sears, And Jack S. Levy, Oxford University Press 2013, hal. 1

1. Non-Psychological Explanations of Threat Perception

Persepsi ancaman merupakan perspektif pemimpin dalam melihat potensi ancaman dan perang melalui aspek rasional. Persepsi ancaman timbul karena adanya pemikiran rasional yang berasal dari perspektif pemimpin. Pemikiran rasional yang terbentuk ini muncul dari pengalaman hidup si pemimpin, atau mungkin lingkungan sekitarnya yang selalu saja berpotensi mengancam sehingga terbentuklah pemikiran seperti itu. Dalam memahami suatu ancaman, pemimpin melihat berdasarkan sudut pandangnya sendiri sehingga terkadang ancaman akan dengan sangat cepat membentuk karakter seseorang. Sifat-sifat yang timbul akibat pengaruh ancaman juga akhirnya membentuk persepsi terhadap individu tersebut. Hal inilah yang membuat pemimpin memiliki perbedaan persepsi antara informasi yang didapat dan menurut subjektifnya sendiri. Perbedaan persepsi disebabkan oleh interpretasi sinyal informasi yang keliru. Interpretasi sinyal yang keliru kerap menjadi pemicu perang, meningkatnya ketegangan di antar negara, dan berbagai macam krisis lainnya. Sehingga ketika mempersepsikan sesuatu, seorang pemimpin akan merujuk kepada pengalaman-pengalaman yang menjadi pembelajaran dan akan membuat suatu keputusan berdasarkan hal yang pernah terjadi atau malah membuat suatu kejadian baru agar kejadian lama tidak terulang.

Sinyal dalam persepsi ancaman lebih ditentukan kepada pemimpin, dalam hal ini pemimpin yang memberikan sinyal di mana komitmen sinyalnya tidak bisa terjaga dengan baik atau tidak kredibel yang mengakibatkan kerancuan dan misinterpretasi oleh penerima sinyal di mana hal ini berujung pada persepsi ancaman yang bias. Sinyal dan persepsi ancaman menjadi makin sulit dan kompleks

ketika niat dari pemberian sinyal tersebut susah dipahami karena permasalahan keamanan.

Kemudian, Stein menyebutkan ada lima penjelasan non psikologis yang membentuk persepsi ancaman. Pertama, *changing balances of power*, perubahan keseimbangan kekuasaan yang dirasakan oleh pemimpin mempengaruhi bagaimana pemimpin melihat ancaman. Hal ini bersifat sistemik dan dapat menciptakan insentif bagi pemimpin atau pengirim sinyal untuk menahan informasi pribadi yang mengakibatkan sulitnya penerima sinyal memahami persepsi ancaman. Kedua, *status dilemma*, ini terjadi ketika seorang pemimpin baru akan puas terhadap status atau kedudukannya jika dia mengetahui informasi lengkap tentang pihak lainnya atau hal yang dianggapnya sebagai ancaman. Tanpa informasi yang lengkap, pemimpin akan merasa bahwa status atau kedudukannya sedang terancam, bahkan ketika sebenarnya tidak terancam. Oleh karena hal ini, pemimpin kemudian mengambil tindakan untuk menegaskan kedudukannya dari ancaman pihak lain. Ketiga, *structural attributes of the political system.* Di sini dijelaskan bahwa organisasi dan birokrasi politik dapat menghasilkan patologi di mana para pemimpin menghadapi ancaman dengan mengedapankan kepentingannya dan kepentingan institusionalnya. Selanjutnya, *sociocultural*, masyarakat domestik dan identitas yang menyertai pemimpin dapat berpengaruh terhadap bagaimana seorang pemimpin memandang sebuah ancaman. Terakhir, *the breaking of norms*, pelanggaran norma yang dilihat oleh pemimpin menjadi sinyal kritis yang meningkat persepsi ancaman pemimpin tersebut.

2. *Psychological Explanations of Threat Perception*

Psikologi mempengaruhi persepsi ancaman dan pengambilan keputusan seorang pemimpin. Di mana cara pandang, karakteristik, nilai atau ideologi yang melekat dalam pikiran pembuat kebijakan atau seorang pemimpin negara yang dapat mengerti suatu fenomena menjadi sebuah ancaman. Kebanyakan ahli telah mengidentifikasi pola persepsi yang menyimpang dari rasionalitas dalam konteks krisis dan perang karena tidak memperhatikan untuk pengidentifikasian pola-pola persepsi ketika menilai suatu ancaman yang stabil dan rutin, atau ketika menilai ancaman namun tidak berujung pada kekerasan di mana peran psikologi lebih cenderung menjadi bagian dalam persepsi ancaman dan pengambilan keputusan.[39]

3. *Cognitive Biases and Heuristics*

Pemikiran dan heuristik digunakan untuk mengurai kompleksitas dan mengantisipasi ketidakpastian, mengendalikan informasi, dan membuat kesimpulan-kesimpulan umum terkait persepsi ancaman. Keyakinan seorang pemimpin terhadap informasi yang ia dapat terkait ancaman, diinterpretasikan dengan hal-hal yang sudah ia pelajari sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi pemimpin itu sendiri. Selain itu reaksi pemimpin dalam menghadapi ancaman bisa dikatakan harus lah sederhana dan konsisten begitu juga ketika mengeluarkan kebijakan sehingga selanjutnya ketika mengahadapi ancaman tidak akan timbul lagi rasa panik berlebihan ataupun prasangka yang malah memunculkan mispersepsi dari ancaman tersebut.

---

[39] C.O. Meyer, *International Terrorism As A Force Of Homogenization?* Hal. 10

4. Loss Aversion, Framing, and Risk Propensity

Sudut pandang kapabilitas pemimpin penting dalam menanggapi keuntungan, kerugian serta risiko terkait persepsi ancaman. Kapabilitas seorang pemimpin ini akan sangat terlihat ketika melindungi suatu yang sudah dimiliki. Pemimpin akan berusahan melakukan apapun dalam hal ini mungkin saja merujuk kepada tindakan agresif ataupun non agresif untuk melindungi miliknya. Namun kepribadian seorang pemimpin pun ikut menentukan kecenderungan risiko yang diambil. Pemimpin dengan sifat agresif cenderung mengambil langkah yang banyak menimbulkan risiko untuk menunjukkan kapabilitasnya sebagai seorang pemimpin dan hal tersebut juga akan sama dengan pemimpin yang non agresif akan mengambil langkah sesuai perhitungan hingga tidak terjadi banyak risiko yang akhirnya malah banyak menimbulkan kerugian. Sehingga, kebijakan-kebijakan yang terbentuk oleh para pemimpin, semua itu akan berkaitan dengan kapabilitas yang dimiliki si pemimpin tersebut..

5. Emotion and Threat Perception

Emosi memainkan peran yang dominan dalam pemikiran dan kaitannya dengan persepsi ancaman. Penelitian tentang emosi memiliki dampak yang signifikan terhadap analisis berbagai isu global. Emosi mengambil peran yang pertama karena bersifat otomatis dan cepat, yang beroperasi di bawah ambang kesadaran, dan memainkan peran yang dominan dalam membentuk persepsi dan perilaku. Emosi membawa informasi kepada orang-orang tentang proses bawah sadar mereka yang kemudian menjadi pikiran dan perasaan sadar dan mempengaruhi persepsi dan keyakinan mereka. Ada beberapa faktor yang

berkenaan dengan emosi yang meningkatkan persepsi ancaman, diantaranya adalah ketakutan. Ketakutan merupakan faktor emosi yang dapat meningkatkan persepsi ancaman. Persepsi ancaman tetap tinggi meskipun tidak ada serangan besar namun hal tersebut masih bagian dari fokus publik dan politik. Selain ketakutan, penghinaan dan kredibilitas dalam menangkal ancaman adalah faktor-faktor yang bersifat emosional yang mampu meningkatkan dan mempengaruhi persepi ancaman.

6. Emotion and Collective Appraisal

Ancaman dan penghinaan yang tertuju pada suatu negara memicu emosi masing-masing individu, salah satunya adalah ketakutan. Ketakutan adalah keadaan emosional dan merupakan salah satu indikator pesimisme tentang masa depan. Sebuah integrasi psikologi yang dimasukkan dalam kajian teori hubungan internasional, dan bersandingan dengan teori rasional. Ketakutan dan Emosi individu-individu ini pada akhirnya bermuara pada emosi yang bersifat kolektif. Hal ini dapat terjadi, atau bertambah, dikarenakan oleh pernyataan atau sikap pemimpin politik, diskusi-diskusi atau berupa pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh dan pengamat politik yang kerap didengar publik di media massa, serta didukung oleh praktik atau kebijakan yang merupakan reaksi dari persepsi ancaman oleh pemimpin politik. Emosi individu ini menjadi emosi yang bersifat nasional, atau emosi sebuah bangsa yang dipicu dan berkembang atas dasar penilaian kolektif dengan identitas sosial yang sama.

Dari konsep persepsi ancaman yang dijelaskan oleh Janice Gross Stein, Penulis tidak menemukan faktor psikologis yang memunculkan persepsi ancaman

Trump. Hal ini dikarenakan tidak adanya trauma masalalu atau pengalaman psikologis Trump secara langsung terhadap imigran, khususnya imigram Meksiko. Di sini penulis melihat bahwa persepsi ancaman Donald Trump dipengaruhi oleh faktor non psikologis, yaitu *sociocultural*. Hal ini dapat dilihat dari nilai-nilai yang sudah ada di Masyarakat AS, nilai-nilai inilah yang mempengaruhi Trump dalam penetapan kebijakan *Zero Tolerance*.

Dalam tulisannya, Stein menyebutkan bahwa salah satu variabel yang dapat menjelaskan persepsi ancaman adalah *sociocultural*. Masyarakat domestik dan identitas yang menyertainya mempengaruhi pembuat kebijakan dalam menerima ancaman.[40] Identitas atau nilai-nilai dapat mengkondisikan penilaian ancaman begitu kuat. Dalam hal ini Penulis melihat bahwa nilai-nilai atau identitas yang sudah melekat pada masyarakat AS mempengaruhi Presiden Donald Trump dalam penetapan kebijakan *Zero Tolerance*. Penulis memandang bahwa nilai-nilai supremasi kulit putih, sentimen anti-Meksiko, serta nativisme yang sudah ada di masyarakat AS mempengaruhi Trump melihat ancaman.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengobservasi perilaku atau sikap objek-objek penelitian sehingga dapat ditemukan makna dari fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif bersandar pada analisis data-data non numerik baik dalam bentuk tekstual maupun lisan yang dilakukan dengan studi mendalam terhadap isu, fenomena, kawasan,

[40] Janice Gross Stein, "*Threat perception in International Relations, Forthcoming in The Oxford Handbook of Political Psychology*", 2nd ed. Edited by Leonie Huddy, David O. Sears, and Jack S. Levy, Oxford University Press (2013) hal. 7

negara, organisasi, maupun individu untuk memahami makna dan proses yang terjadi dalam politik internasional.[41]

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin, metode kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).[42] Penelitian kualitatif ini berusaha untuk membangun realitas dan memahami realitas tersebut dengan memperhatikan proses peristiwa dan intensitas.[43] Hal ini bertujuan untuk mendapatkan analisa yang lebih tajam dengan didasari fakta-fakta dan dinamika yang telah di publikasikan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian analitis deskriptif. Penelitian ini akan menjelaskan secara deskriptif terkait isu yang dikaji melalui ucapan maupun perilaku seorang pembuat kebijakan. Penulis memilih penelitian jenis ini agar penulis mampu menggambarkan secara gamblang mengenai persepsi ancaman Donald Trump dalam penetapan kebijakan *Zero Tolerance* terkait isu imigran di AS.

1.8.2 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan penelitian pada tahun 2016-2018. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2016 adalah masa kampanye

---

[41] Christopher Lamont, *Research Methods in International Relations,* (California: SAGE Publications, 2015), hal. 78

[42] Pamela Maykut dan Richard Morehous, "Beginning Qualitative Research: A Philosophic and Practical Guide" dalam Umar Suryadi Bakry, "Metode Penelitian Hubungan Internasional", Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2016), hal. 18-20

[43] Gumilar Ruslinawa Soemantri. "Memahami Metode Kualitatif" *Journal Social Humaniora,* Vol 9: 2005, hal. 58.

Donald Trump yang pada saat itu Ia telah memulai menyinggung isu imigran. Kemudian tahun 2018 adalah tahun penetapan kebijakan *Zero Tolerance*.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis adalah unit yang perilakunya hendak diteliti, dijelaskan, dan atau diramalkan.[44] Penelitian ini mengadopsi individu sebagai unit analisis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu, yaitu Presiden Donald Trump. Sedangkan unit yang berdampak terhadap unit analisis yang hendak diamati disebut sebagai unit eksplanasi.[45] Unit eksplanasi penelitian ini adalah isu imigran di AS. Tingkat atau level analisis merupakan tingkatan objek yang menjadi fokus utama dalam pembahasan sebuah penelitian.[46] Level analisis dalam penelitian adalah level individu.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder dalam mencari informasi dan data yaitu melalui buku, artikel jurnal, publikasi, dokumen pemerintah AS, dan sumber berita dari internet. Adapun pengumpulan data dari penelitian ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan dengan mempelajari dan menganalisa tulisan-tulisan serta literatur yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Sumber yang dijadikan bahan rujukan bagi penulis adalah buku biografi yang menceritakan perjalanan hidup Donald Trump

[44] Mohtar Masoed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: Pustaka LP3S, 1993) hal. 36
[45] Mohtar Masoed, 36
[46] Mohtar Masoed, 41

berjudul Trump Revealed. Penulis juga menggunakan situs resmi pemerintahan AS seperti www.federalregister.gov.

Selain itu, penelitian ini juga didukung artikel jurnal dengan judul *United States Immigration Policies in the Trump Era*, artikel berjudul *Attitudes of the United States' Presidents Towards Immigration: George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump*, dan artikel jurnal pendukung lainnya, serta situs berita online seperti CNN, BBC, Time, dan lain-lain. Kata kunci yang peniliti gunakan dalam mencari sumber data dan informasi adalah Donald Trump on Immigration, US Immigrants, dan Zero Tolerance Policy.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan data guna memperoleh suatu pola atau bentuk-bentuk keteraturan.[47] Data-data penelitian yang telah dihimpun dari sumber di atas, kemudian dikelompokkan dan diinterpretasikan oleh peneliti guna menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Interpretasi data penelitian berarti menjelaskan pola yang belum terpecahkan melalui analisis data, memberikan gambaran latar belakang pengetahuan maupun pengalaman untuk menjawab pertanyaan dengan menghubungkannya dengan data-data ilmiah. Menurut Miles dan Huberman, analisis terdiri dari tiga alur atau proses kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpula.[48] Penjelasan terhadap tiga alur atau proses tersebut antara lain:

---

[47] Lexy J. Meoleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Karya, 1989), hal. 112-113.

[48] Matthew Miles dan Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, (California: SAGE Publication, 1994), hal 10-11

1. Reduksi data

   Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi kan data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.[49] Setelah data-data dikumpulkan melalui berbagai sumber yang telah disebutkan, penulis akan menggolongkan atau mengelompokkan data-data kepada tiga bagian sebagai turunan dari konsep sociocultural, yaitu *White Supremacy, Anti-Mexican Sentiment,* dan *Nativism*.

2. Penyajian data

   Penyajian data adalah sebuah rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan untuk melakukan penarikan simpulan.[50] Setelah data-data telah direduksi sesuai kelompok data, peneliti akan menyajikan data sesuai kelompok data yaitu *White Supremacy, Anti-Mexican Sentiment,* dan *Nativism*.

3. Penarikan kesimpulan

   Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh setelah proses reduksi dan penyajian data dilakukan. Kesimpulan-kesimpulan ini kemudian juga diverifikasi selama penelitian

[49]Matthew Miles dan Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, (California: SAGE Publication, 1994), hal 10
[50] Miles dan Huberman, 11

berlangsung.[51] Di sini penulis akan mendeskripsikan persepsi ancaman Donald Trump dalam penetapan kebijakan *Zero Tolerance* terkait isu imigran di AS untuk menjawab pertanyaan penelitian menggunakan konsep persepsi ancaman oleh Janice Gross Stein.

Pada penelitian ini, analisis akan dititik beratkan dengan menilik persepsi ancaman Donald Trump dalam penetapan kebijakan *Zero Tolerance*. Dalam memudahkan proses analisis, maka penelitian ini akan menggunakan peta pemikiran sebagai berikut:

[51] Miles dan Huberman, 11

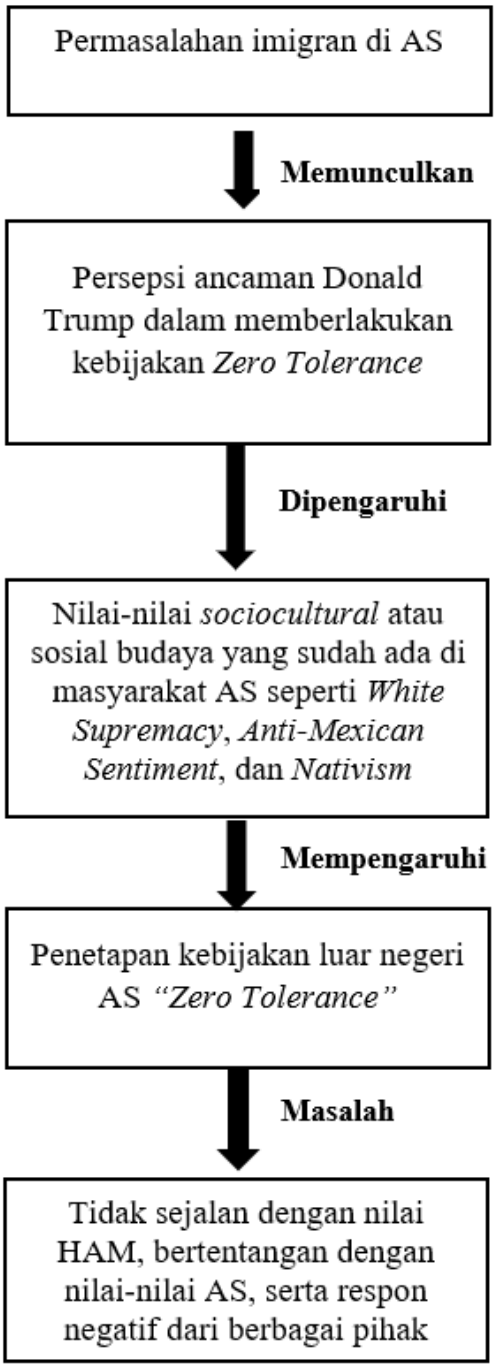

Gambar 1.1 Bagan Peta Pemikiran

Sumber: Diolah oleh peneliti (2022)

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi kepustakaan terhadap tulisan ilmiah atau penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan rujukan dan pembanding, kerangka konseptual sebagai alat analisis penelitian, metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, batasan masalah, unit analisis dan tingkat analisis, teknik pengumpulan dan analisis data serta sistematika penulisan.

BAB II Kebijkan *Zero Tolerance* terkait Isu Imigran di Amerika Serikat

Bab ini akan menjelaskan mengenai isu imigran di AS, pandangan AS terhadap imigran, dan penjelasan terkait kebijakan *Zero Tolerance*.

BAB III Perjalanan Hidup Donald Trump

Pada bab ini akan menjelaskan terkait kisah perjalanan hidup Donald Trump sebelum ia menjadi Presiden AS. Dimulai dari masa kecil sampai terjun ke dunia politik hingga terpilih sebagai Presiden AS.

BAV IV Persepsi Ancaman Donald Trump dalam Penetapan Kebijakan *Zero Tolerance*.

Bab ini akan menjelaskan analisis persepsi ancaman Donald Trump dengan menggunakan kerangka pemikiran hubungan persepsi ancaman dengan proses

pengambilan keputusan sehingga ia memutuskan untuk menetapkan kebijakan *Zero Tolerance* .

BAB V Penutup

Merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan, saran terkait penelitian dan daftar kepustakaan.

UNIVERSITAS ANDALAS
KEDJAJAAN
UNTUK BANGSA